IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG EKONOMI OLEH UN WOMEN DI KENYA 2019-2024

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

WILDA

18323135

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG EKONOMI OLEH UN WOMEN DI KENYA TAHUN 2019-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

WILDA

18323135

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG EKONOMI OLEH UN WOMEN DI KENYA TAHUN 2019-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

29 November 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	
2	Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.	
3	Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wilda

No. Mahasiswa : 18323135

Dosen Pembimbing : Gustri Eni Putri,S.I.P.,M.A.

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ekonomi oleh UN Women di Kenya Tahun 2019 -2024

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 7 November 2024



wilda

Tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa

4

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....1

HALAMAN PENGESAHAN.....3

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....5

DAFTAR ISI.....6

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR.....7

BAB 1

PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....7

1.3 Tujuan Penelitian.....7

1.4 Cakupan penelitian.....7

1.5 Tinjauan Pustaka.....8

1.6 Kerangka Pemikiran.....9

1.7 Argumen Sementara.....13

1.8 Metode Penelitian.....14

1.8.1 Jenis Penelitian.....14

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....14

1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....14

1.8.4 Proses Penelitian.....15

1.9 Sistematika Pembahasan.....15

BAB 2.....16

2.1 Permasalahan Ketidaksetaraan Ekonomi terhadap Perempuan 2019-2022.....16

2.2 Kegagalan Pemerintah Kenya dalam mengatasi Ketidaksetaraan Gender dan Masuknya UN Women di Kenya.....26

2.3 Aktor yang terlibat dalam membantu UN Women.....30

BAB 3.....33

3.1 Manajemen approach UN Women dalam mengimplementasikan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi di Kenya.....34

3.1.1 Monitoring oleh UN Women berdasarkan laporan kementerian perempuan Kenya. 35

3.1.2 Monitoring UN Women berdasarkan laporan NGO.....36

3.1.3.Penyelesaian masalah UN Women.....37

3.1.4 Capacity Building.....40

3.2 Kerjasama UN Women di Kenya untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi.....45

3.2.1 Bantuan keuangan dan teknis oleh UN Women kepada Kenya..... 48

3.2.2 Bantuan Teknis Berupa Pemberdayaan oleh UN Women kepada perempuan di Kenya.....50

BAB 4.....52

PENUTUP..... 52

4.1. Kesimpulan..... 52

4.2 Rekomendasi.....54

DAFTAR PUSTAKA.....55

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Gambar 1. Tiga pendekatan dalam mengimplementasikan organisasi internasional

Implementasi Organisasi Internasional

Tabel 1 Persentase Sektor Kerja Perempuan dan laki laki

Tabel 2 Dampak pandemi Covid 19 terhadap bidang ekonomi

ABSTRAK

Ketidaksetaraan gender merupakan sebuah permasalahan yang terjadi di seluruh dunia baik negara maju maupun negara dunia ketiga, Kenya merupakan salah satu negara yang masih memperjuangkan kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan, Akibat pandemi Covid19 ketimpangan gender berdampak pada bidang ekonomi bagi perempuan di Kenya yang menimbulkan ketidakberdayaan perempuan dalam melindungi diri serta mengembangkan diri secara maksimal, Penelitian ini memuat analisis terkait dengan bagaimana UN Women menjamin implementasi kesetaraan gender dalam bidang ekonomi pada tahun 2019-2024 di Kenya sehingga akan diketahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh UN Women untuk menjamin kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan di Kenya dalam bidang ekonomi.

Kata kunci : UN Women, Teori organisasi internasional, Kenya, Pemberdayaan Perempuan

BAB 1

1.1 Latar Belakang

Kenya merupakan sebuah negara yang berada di benua Afrika memiliki sejarah panjang semenjak meraih kemerdekaan dari penjajahan Inggris melalui perjuangan suku MAU MAU pada tahun 1950. Sebagai dunia ketiga Kenya mengalami berbagai macam permasalahan pada berbagai bidang seperti, politik, sosial dan ekonomi. Salah satu isu yang cukup signifikan adalah sulitnya perempuan mencari pekerjaan akibat isu kesenjangan gender, menurut survei Bank Dunia terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan pada industri berkembang di Kenya. Di negara yang didominasi dengan sektor pertambangan dan juga minyak seringkali mempersulit perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan memperkecil kesempatan perempuan untuk berpartisipasi pada sektor yang cukup menjanjikan tersebut, data ekonomi pada tahun 2020 survey menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja perempuan sebesar 13,3 Persen hal tersebut menunjukkan masih ada tantangan yang dihadapi perempuan untuk bersaing dalam dunia kerja (“Matagaro - UNIVERSITY OF NAIROBI INSTITUTE OF DIPLOMACY AND I.Pdf,” n.d.)

Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Kenya berupa diskriminasi ekonomi yang dialami oleh perempuan. Sebanyak 80 persen perempuan di Kenya bekerja pada bidang pertanian namun kesempatan perempuan untuk mendapatkan akses atas kepemilikan tanah hanya sebesar 20 persen hal ini disebabkan struktur sosial yang terjadi di Kenya memperparah kesenjangan yang dialami oleh perempuan di Kenya, meskipun pertanian memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto

negara namun akibat dari kesenjangan yang dihadapi perempuan mengakibatkan perempuan di Kenya tidak dapat memaksimalkan potensi pada bidang pertanian (“Matagaro - UNIVERSITY OF NAIROBI INSTITUTE OF DIPLOMACY AND I.Pdf,” n.d.).

Selain itu permasalahan di luar politik dan juga urusan negara seperti ketidakberdayaan perempuan akan mengancam keadaan negara dimasa depan. Contoh nyata apabila perempuan tidak diberikan wadah dan juga kesempatan untuk ikut mengambil keputusan akan mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia yang baik karena perempuan yang akan menjadi ibu tentunya harus memiliki kualitas sumber daya yang baik sehingga dapat menjalankan peran penting dalam merawat dan mengasuh anak hingga menjadi manusia yang baik dan juga cerdas namun apabila negara tidak memperhatikan kebutuhan perempuan dan juga hak asasi perempuan maka sumber daya yang baik tidak akan terlahir di masa depan karena peran perempuan yang tidak dapat dimaksimalkan dalam dunia kerja dan juga pendidikan sehingga pendapatan negara tidak dapat meningkat, peran seorang wanita hanya sebatas istri dan juga ibu dimana perempuan diwajibkan untuk selalu mengabdi kepada laki laki. Ketidaksetaraan yang nyata terjadi dan memiliki dampak yang besar terhadap keselamatan dan juga kesejahteraan perempuan dan anak di Kenya ini merupakan suatu bentuk diskriminasi dalam bidang ekonomi bahkan sebelum Covid yang merupakan sebuah permasalahan berupa pandemi menimbulkan masalah ekonomi yang berujung terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sejarah menyatakan bahwa sebelumnya Kenya sudah pernah menandatangani CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) pada tahun 1984

dan meratifikasi nya pada tanggal 9 Maret 1984 , langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Kenya adalah mengesahkan undang undang tentang larangan diskriminasi gender khususnya perempuan beserta kebebasan dalam bekerja dan memiliki pendidikan pada tahun 2011 , Namun kasus kekerasan berbasis gender di kenya masih tergolong tinggi kekerasan berbasis gender ini juga meliputi diskriminasi terhadap perempuan di dalam bidang ekonomi yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kekerasan yang ditimbulkan oleh laki laki . Implementasi CEDAW di Kenya mengalami banyak kendala seperti kualitas SDM dan juga tingkat pendidikan namun faktor yang paling mempengaruhi adalah struktur sosial berupa sistem patriarki yang dianut oleh sebagian besar lapisan sosial masyarakat Kenya bahkan beberapa aparatur negara juga masih belum menyadari terkait diskriminasi yang dilakukan terhadap para perempuan hal tersebut mengakibatkan pelaporan dan juga mengimplementasikan CEDAW dikalangan masyarakat masih kurang maksimal (Byrnes & Freeman, n.d.).

Adaptasi nilai pada CEDAW yang digunakan sebagai tuntutan pada penghapusan kekerasan berbasis gender khususnya pada perempuan dalam bidang ekonomi yang diutarakan oleh kementerian perempuan di Kenya yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan pada bidang ekonomi serta menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk norma yang diadaptasi dan dijadikan tujuan nasional pemerintah Kenya dalam meningkatkan kesetaraan gender (“LABOUR RPT ON SESSIONAL PAPER NO 2 OF 2019 - NATIONAL GENDER & DEVT POLICY.Pdf,” n.d.)

Meskipun CEDAW sudah diadaptasi dan dijadikan sebagai hukum legal dan tujuan nasional pemerintah Kenya penanganan kekerasan terhadap perempuan, keadaan dan kondisi di Kenya terkait kesetaraan *gender* masih belum bisa dikatakan membaik oleh karena itu pemerintah Kenya bekerjasama dengan UN Women untuk meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta menandatangani perjanjian bersama dengan pemerintah Kenya. UN Women bertujuan untuk membantu mengurangi ketidaksetaraan *gender* melalui program kerjasama dan pendampingan dengan pemerintah dan juga NGO untuk memberdayakan perempuan, sehingga dapat mewujudkan SGD yang diusungkan oleh PBB. Pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh UN Women adalah pengakuan serta pemberian wadah bagi perempuan bahwa perempuan agar memiliki hak dan juga kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Pada masa Covid 19 tentunya kesenjangan ekonomi di Kenya antara laki laki dan perempuan serta meningkatnya resiko kekerasan yang diterima perempuan pada masa pandemi Covid 19 mengakibatkan UN Women bekerja sama dengan pemerintah Kenya untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi , UN Women memfasilitasi perempuan pada bidang ekonomi diketahui UN Women memberdayakan perempuan melalui pengembangan Ekonomi di era covid 19 agar perempuan dapat melindungi diri dari kemiskinan dan juga kekerasan karena menurut data dari UN Women sebanyak 65 Persen perempuan mengalami dampak ekonomi kemiskinan dibanding laki laki yang sebesar 56 Persen (John et al., 2021a)

Menurut data dari WHO sebelum Covid 19 berlangsung terdapat 30 Persen perempuan berumur 15 tahun mendapatkan kekerasan sexual dan jumlah tersebut makin meningkat besar akibat dari Covid 19. Kekerasan yang dialami oleh perempuan tentunya tidak hanya berupa kekerasan fisik namun juga verbal yang didapatkan dari keluarga atau pasangan, hal tersebut menjadi suatu concern bagi pemerintah dunia internasional karena akibat covid terdapat bayangan permasalahan besar yaitu kasus kekerasan berbasis gender yang mungkin dialami oleh setiap perempuan di seluruh dunia (John et al., 2021a).

Diskriminasi akses antara perempuan dan laki-laki di Kenya memperburuk risiko kekerasan berbasis *gender*. sebelum pandemi tingkat kekerasan berbasis gender sudah tinggi situasi ini menjadi semakin buruk karena pemerintah menetapkan *lockdown*, Pada 15 maret 2019 pemerintah kenya menetapkan lockdown bagi seluruh sekolah. Setelah pengumuman tersebut sekitar 1,5 bulan pandemi terjadi tingkat kekerasan di kenya meningkat selama pandemi terdapat total kasus kekerasan berbasis gender di kenya sekitar 3.650 kasus kekerasan berbasis gender(John et al., 2021b).

Pandemi Covid19 juga membawa dampak yang cukup significant pada bidang ekonomi pada juni 2020 sebanyak 39 Persen perempuan kehilangan pendapatanya dikarenakan pandemi Covid19 hal tersebut tentunya mengakibatkan kemiskinan di Kenya makin meningkat. Sebelum Covid19 tingkat kemiskinan di Kenya mencapai 20 juta menurut Bank Dunia ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena salah penyebab utama munculnya kekerasan di antara gender adalah keadaan ekonomi yang tidak stabil (Karp et al., 2021).

Ekonomi memegang peran yang sangat penting pada sebuah negara akibat dari Covid sebesar 1 juta orang kehilangan pekerjaan serta hanya sekitar 45 Persen perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Penurunan level ekonomi juga mengakibatkan akses kesehatan menjadi sulit diakses akibat keuangan yang juga ikut menurun (Shumba et al., 2020).

Permasalahan ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki laki tidak hanya sampai pada batas sulitnya perempuan menemukan pekerjaan yang setara dengan laki- laki. Selain sebagai negara dengan pertambangan yang banyak Kenya jika menjadi negara yang memiliki tanah subur yang dapat ditanami oleh tanaman pokok asli Afrika, ini menjadi sumber penghasilan utama perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang sesuai dengan kriteria perusahan pertambangan, sektor ini didominasi oleh perempuan dengan pendidikan kelas bawah namun sangat masih disayangkan bahwa tanah yang digunakan oleh para petani perempuan tidak dapat dimiliki oleh perempuan dikarenakan oleh hukum bahwa tanah hanya dapat dibeli oleh laki laki, ini juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Kenya (Hackfort et al., 2024)

Dampak Covid19 bisa dirasakan terutama perempuan pada bidang ekonomi di Kenya sehingga menimbulkan masalah salah satu dampaknya adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, tujuan SDG dari UN Women dan juga implementasi CEDAW menjadi terhambat sehingga UN Women berupaya mengawasi serta membantu perempuan di Kenya untuk mendapatkan kesetaraan melalui bidang ekonomi agar *gender equality* dapat tercapai pada tahun 2030.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana UN Women menjamin implementasi kesetaraan gender dalam bidang ekonomi di Kenya tahun 2019- 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menjelaskan bagaimana UN Women menjamin implementasi oleh UN Women dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender pada bidang ekonomi tahun 2019-2024

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini dibatasi dari tahun 2019 hingga 2024 serta mengakibatkan ketidaksetaraan gender di kenya meningkat menjadi semakin tinggi.

UN Women mengimplementasikan nilai yang dimiliki menjadi agenda yang mengarah pada undang undang CEDAW terkait kesetaraan yang dapat dimiliki perempuan dalam bidang ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan melalui kebijakan UN Women untuk meningkatkan kesetaraan gender. Tahun 2019 dipilih menjadi fokus karena pada periode tersebut tingkat kekerasan terhadap perempuan meningkat 1000 persen hal tersebut diperparah dengan tingkat kemiskinan pada perempuan yang lebih tinggi daripada laki- laki. UN Women mencoba untuk mengatasi isu ini dengan memberikan wadah yang digunakan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui sosialisasi serta kerjasama dengan pemerintah Kenya dan berbagai NGO. Sedangkan pada tahun 2024

terdapat peningkatan ekonomi pada bidang pertanian sebesar 7 Persen seperti diketahui bahwa kebanyakan perempuan di Kenya mendominasi pekerjaan pada sektor pertanian dan perikanan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil kajian dan juga penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkaji dan membandingkan hasil temuan terbaru dengan cakupan permasalahan dan juga objek penelitian yang berbeda temuan ini digunakan untuk menambah pengetahuan baru untuk studi hubungan internasional. Berikut beberapa jurnal yang dijadikan sebagai bahan kajian :

Jurnal yang pertama merupakan jurnal yang berjudul Peran UN Women dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan pada bidang pertanian di Uganda tahun 2015-2021 jurnal ini berisi tentang upaya UN Women dalam mengatasi diskriminasi pada bidang ekonomi di uganda khususnya pertanian ditulis oleh Fiki Rahmatina jurnal inin juga menjelaskan program yang dirancang oleh un women yang membuat perempuan uganda menjadi berdaya, jurnal ini mengangkat tema yang sama dan dapat membantu penulis untuk menganalisis ketidaksetaraan gender yang terjadi di negara afrika (*PERAN UN WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PADA BIDANG PERTANIAN DI UGANDA TAHUN 2015 – 2021*, n.d.).

Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul *Domestic Violence and Female Genital Mutilation* in Kenya: Effects of Ethnicity and Education yang ditulis oleh john gordon simister (Simister, 2010) di dalam tulisanya john menjelaskan tentang kekerasan yang dialami perempuan di Kenya melalui sunat pada alat kelamin john juga menjelaskan bahwa keterkaitan antara praktik FGM terhadap perempuan

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan juga ekonomi perempuan, jurnal ini mengangkat tema yang sama dan dapat membantu penulis untuk menganalisis gender inequality di Kenya melalui studi kasus dan faktor terjadinya gender gap di Kenya.

Jurnal yang ketiga adalah jurnal yang berjudul mengkaji efektifitas UN Women dalam meningkatkan gender equality di afghanistan untuk mewujudkan (SDGs) jurnal yang ditulis oleh Zhafarina Shamimi,Najamuddin, dan Mohd Agus berisi tentang efektifitas UN Women dalam meningkatkan kesetaraan gender di Afghanistan melalui *afghanistan Sustainable Developments* jurnal ini memiliki objek penelitian yang sama yaitu UN Women dalam menangani kasus ketidaksetaraan gender dan dapat dijadikan penulis salah satu sumber untuk menulis karya tulis (Shamimi & Rijal, 2022).

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini ditulis dan digunakan untuk mengetahui peran UN Women dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender yang terjadi di Kenya selama pandemi Covid 19 terjadi. Penulis menggunakan teori organisasi internasional yang diutarakan oleh jutta joachim, bob reinalda, dan juga bertjan verbeek (jutta joachim,Bob Reinalda,Bertjan Verbeek, 2007). Di dalam teori ini berisi tentang sejarah awal mulanya organisasi internasional ditemukan sebagai sebuah aktor di dalam hubungan internasional, pada masa perang dingin hingga akhirnya terjadi globalisasi mengakibatkan organisasi internasional membuat peraturan yang akhirnya diimplementasikan menjadi regulasi serta bentuk konkret dari sebuah lembaga yang berwenang untuk mempengaruhi sebuah negara membentuk dan mengesahkan sebuah undang undang di dalam dunia

internasional. Implementasi dari sebuah organisasi internasional disini mengacu pada tindakan nyata sebuah negara dalam mematuhi peraturan yang telah disepakati dengan organisasi internasional. Seiring berkembangnya zaman organisasi pada masa sekarang bukan hanya perpanjangan tangan dari sebuah negara atau pemerintah namun organisasi berperan penting di dalam hubungan internasional dalam membawa suatu isu tertentu dan memberikan solusi serta pendampingan serta organisasi internasional memiliki hak dalam perpolitikan dunia internasional terkait isu isu yang ada pada dunia internasional.

joachim dan bob menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam organisasi internasional yaitu enforcement approach, manajerial, dan normative.

Gambar 1. Tiga pendekatan dalam mengimplementasikan organisasi internasional

Table 1.1 Implementation approaches

	Enforcement approach	*Management approach*	*Normative approach*
Resources	• *Naming and shaming*, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • *Sanctions*, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming	• *Monitoring* on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • *Capacity building and problem solving* through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance	• *Authority and legitimacy*

Sumber: Implementasi Organisasi Internasional (jutta joachim,Bob Reinalda,Bertjan Verbeek, 2007)

Enforcement approach adalah pendekatan yang bersifat memaksa atau koersif yang memaksa sebuah negara untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan memperhatikan cost and benefit, apabila sebuah negara setuju untuk meratifikasi atau membuat perjanjian dengan IO ada konsekuensi yang harus diperhatikan negara. apabila negara tidak dapat memenuhi kewajiban perjanjian maka organisasi internasional berhak memberikan sebuah sanksi berupa sanksi ekonomi dan sanksi militer atau organisasi internasional dapat menciptakan rumor buruk mengenai negara yang tidak dapat menepati kesepakatan di dunia internasional. dalam bentuk lain joachim juga menjelaskan bahwa negara yang gagal mematuhi perjanjian akan mengalami penderitaan secara material dalam kasus ini UN Women tidak memaksa pemerintah kenya untuk menaati peraturan karena pemerintah Kenya membutuhkan UN Women dalam mewujudkan kesetaraan gender serta pemerintah kenya juga sudah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi.

Pada tipe yang kedua yaitu manajerial atau pemantauan dan aksi Joachim dan Verbek mengatakan bahwa implementasi kebijakan organisasi internasional itu dalam bentuk monitoring dan juga pemecahan masalah atau problem solving. Apabila negara gagal mengimplementasikan perjanjian internasional yang telah disepakati maka dapat dipecahkan melalui analisis berupa kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan juga pengaruh dari perubahan sosial ekonomi. oleh karena ini pendekatan manajerial bisa dilakukan melalui konsultasi dan juga usaha dari organisasi internasional. Di dalam pendekatan ini terdapat aktor aktor berupa negara dengan masyarakat sipil,organisasi internasional, organisasi

nasional partai politik dan juga sosial media. Dalam kasus ini pendekatan manajerial dapat diaplikasikan untuk menganalisis kebijakan UN Women melalui program yang dilakukan di Kenya dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi di Kenya yang dilakukan bersama sama dengan pemerintah dan dan NGO yang berkaitan dengan kasus ketidaksetaraan gender di Kenya.

Pendekatan ketiga adalah normatif, yang artinya adalah negara mempercayai sepenuhnya kepada organisasi internasional dan OI memiliki otoritas yang diberikan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah disepakati sebelumnya, untuk mengimplementasikan perjanjian internasional dan juga melakukan kontrol informasi. pendekatan ini

Setelah melihat ketiga pendekatan yang diutarakan oleh joachim penulis akan menggunakan pendekatan managerial untuk meneliti peran UN Women dalam menyelesaikan kasus ketidaksetaraan gender di Kenya karena program yang dimiliki oleh UN Women dalam menyelesaikan permasalahan ini menggunakan cara cara yang kooperatif dan kerjasama terbuka seperti bantuan dana serta pembangunan fasilitas dan mentoring terhadap perempuan di Kenya, pada bagian ini maka akan terlihat bagaimana UN Women bekerja sama dengan pemerintah serta lembaga terkait di Kenya melalui laporan yang diserahkan oleh NGO pemerintah dan juga pihak terkait. Implementasi UN Women akan dijelaskan melalui program program yang digerakan oleh UN Women yang juga dilakukan kerjasama dengan aktor aktor lain untuk menangani permasalahan gender inequality di Kenya. UN Women memberikan wadah dan juga pendampingan kepada pemerintah kenya untuk menyelesaikan ketidaksetaraan gender dalam bidang ekonom khusus nya setelah pandemi melalui pendekatan

manajerial dapat diketahui bahwa un women dan pemerintah kenya bekerjasama sejauh mana serta hal hal apa saja yang dilakukan sesuai dengan teori seperti monitoring capacity building serta bantuan keuangan atau teknis apa saja yang telah diberikan oleh UN Women dalam menjamin kesetaraan gender di Kenya.

1.7 Argumen Sementara

UN Women berperan sebagai aktor internasional yang kedudukannya sangat penting di Kenya, UN Women sendiri digunakan oleh pemerintah Kenya untuk menangani permasalahan gender equality, selain digunakan UN Women juga memiliki tugas serta visi misi untuk mewujudkan SDG (Sustainable Development Goals), Kepada seluruh anggota negara PBB, Namun akibat pandemi Covid19 kesetaraan gender di kenya khususnya pada bidang ekonomi mengalami penurunan yang mengakibatkan tingkat kekerasan terhadap perempuan juga meningkat tinggi sehingga UN Women berupaya melindungi hak- hak perempuan dalam bidang ekonomi agar perempuan dapat melindungi diri dari kemiskinan serta kekerasan berbasis gender di Kenya. UN Women bekerja sama dengan *key strategic planner* pada April 2024 agar perempuan mendapat hak nya untuk duduk di kursi parlemen serta menyuarakan kebutuhan perempuan melalui undang undang yang dibutuhkan perempuan sebagai korban rentan kekerasan berbasis gender di Kenya(“Empowering Women and Promoting Peace: UN Women and Finland Visit Kwale” 2024)

Selain itu UN Women juga melakukan koordinasi dengan African Women and Child Features Services berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui media jurnalistik hal ini digunakan untuk membuat kampanye yang inklusif terkait dengan kesetaraan gender pada saat pandemi Covid19. Fokus UN Women

pada bidang ekonomi serta monitoring UN Women untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi pasca pandemi Covid19.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengetahui implementasi UN Women dalam mengatasi masalah gender inequality di Kenya.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah UN women sebagai salah satu aktor internasional yang berupa organisasi sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi kesetaraan gender dalam bidang ekonomi oleh UN Women dalam menyelesaikan permasalahan gender inequality di Kenya.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan berupa studi literatur yang menggunakan internet jurnal serta buku sebagai informasi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini berlangsung semenjak agustus 2023 dimulai dari mencari berbagai informasi terkait dengan judul penelitian, baik dari jurnal, artikel, buku ataupun website resmi. setelah mendapatkan informasi kemudian penulis memilih serta mulai menganalisa data yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I : Berisi tentang latar belakang serta teori yang akan diambil dari permasalahan yang diangkat penulis, bab 1 juga akan memuat subjek objek serta bagaimana proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II : Berisi tentang penjelasan mengenai profil daru UN Women di Kenya serta menjelaskan kondisi perempuan di Kenya dan bagaimana ketidaksetaraan antara perempuan dan laki laki di afghanistan kemudian upaya apa yang dilakukan oleh un women dalam mengatasi ketidaksetaraan tersebut melalui program kerjasama.

BAB III : Berisi tentang implementasi UN Women.

BAB VI : Kesimpulan dan juga rekomendasi.

BAB 2

PERMASALAHAN KETIDAKSETARAAN GENDER DALAM BIDANG EKONOMI DI KENYA TAHUN 2019 -2024

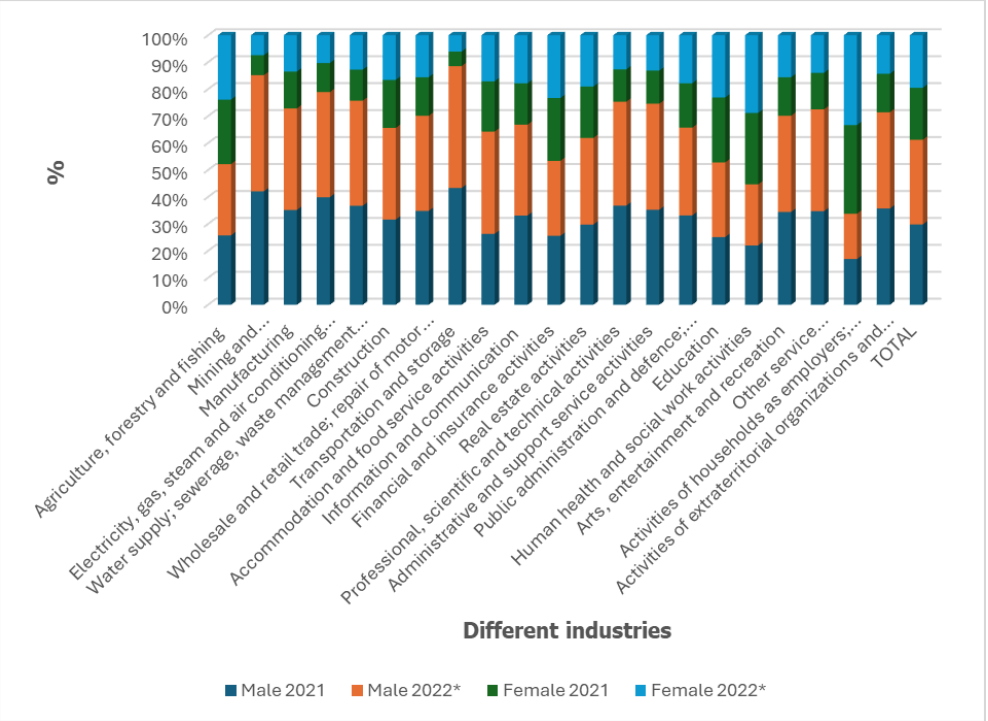
Pada bab kedua ini akan membahas tentang permaprofil UN Women dan masalah yang dihadapi oleh para perempuan di Kenya dalam bidang ekonomi dan juga perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan akibat dari pandemi covid 19. Di dalam bab ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender di Kenya yang meningkat akibat pandemi Covid19 serta upaya UN Women dalam menjamin berjalannya program kesetaraan gender dalam bidang ekonomi di masa pandemi Covid 19.

2.1 Permasalahan Ketidaksetaraan Ekonomi terhadap Perempuan 2019-2022

Perkembangan ekonomi dan juga gender di bawah tanggung jawab *kenya's ministry trade and management*. Namun peraturan yang diterapkan untuk kegiatan ekonomi terbatas hanya bisa diakses dengan mudah oleh kaum laki laki, perempuan di Kenya mengalami kesulitan dalam ikut berkontribusi pada bidang ekonomi. menurut peraturan pemerintah Kenya pada sektor ekonomi perempuan mengalami diskriminasi untuk ikut berkontribusi dalam membangun usaha yang sama seperti laki laki, peraturan yang dibuat oleh pemerintah sangat tidak adil salah satu contoh nya adalah perempuan di Kenya memiliki akses yang sangat terbatas terhadap kepemilikan lahan, selain itu perempuan juga tidak dengan mudah mengambil pinjaman di bank harus ada laki laki sebagai penjamin apabila perempuan ingin meminjam kredit kepada bank, apabila perempuan ingin membangun usaha dan menjadi entrepreneurship urusan birokrasi perempuan

lebih sulit dibanding laki laki oleh karena itu perempuan tidak dapat berkontribusi secara penuh dan juga terbuka pada bidang ekonomi di kenya hal ini yang menyebabkan perempuan akhirnya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri dari kemiskinan dan juga kekerasan (*Gender and Economic Growth in Kenya*, 2007)**.**

Perempuan di kenya hanya memiliki akses kepemilikan tanah sebesar 20,7 persen akses kepemilikan tanah padahal jumlah pekerja perempuan dalam bidang pertanian paling besar sekitar 80 persen dipimpin oleh perempuan ketidaksetaraan gender di Kenya pada bidang pertanian yang tidak memberikan perempuan akses serta regulasi yang mudah bagi perempuan meskipun diketahui bahwa tulang punggung perekonomian negara dipimpin oleh sektor pertanian yang dikerjakan sebagian besar oleh para perempuan di Kenya sektor pertanian menyumbang 25 Persen GDP dan juga menyerap sekitar 75 Persen tenaga kerja seharusnya pertanian dan juga peran perempuan merupakan hal yang seharusnya sangat diperhatikan oleh pemerintah Kenya. Kondisi ekonomi perempuan di Kenya sebelum Covid 19 bukan merupakan suatu kondisi yang lebih baik dilihat pada tabel dibawah jumlah pekerja perempuan dan juga laki laki sebelum pandemi Covid 19 (Onyalo, 2019).



Tabel 1 Persentase Sektor Kerja Perempuan dan laki laki

Dari tabel diatas diketahui bahwa perempuan memegang peran yang sangat sedikit dibanding laki- laki kontribusi perempuan pada bidang ekonomi yang tidak berbahaya dan memerlukan keterampilan sangat masih minim, namun pada pekerjaan yang cenderung berbahaya serta memerlukan keterampilan perempuan tidak memiliki banyak presentasi seperti laki-laki selain itu tenaga kerja tertinggi ditempati pada bidang pertanian dan perikanan dimana perempuan memegang lebih banyak bagian pada bagian bidang yang tidak memerlukan keterampilan(*Promoting Gender Equity and Inclusivity in the Employment Sector in Kenya – KIPPRA*, n.d.)

Kondisi ini diperparah setelah pandemi Covid yang mengakibatkan sektor pertanian di Kenya tidak berjalan dengan baik dimana sebagian besar pekerjaan pada sektor pertanian dijalankan oleh perempuan tidak dapat beroperasi hingga tingkat kemiskinan di Kenya naik dari tahun sebelumnya, selain

itu tingkat pengangguran juga meningkat dari pada sebelum pandemi Covid 19 hal itu menyebabkan banyak rumah tangga akhirnya juga terdampak sehingga 1-3 bisnis rumah tangga harus menutup usahanya (*Kenya Economic Update*, n.d.)

Menurut survey dari World Bank sebanyak 50% perempuan Kenya telah kehilangan pekerjaan dikarenakan keterbatasan akses untuk melakukan kegiatan ekonomi terkait pandemi covid 19 sebanyak 30% perempuan harus mengurangi jam kerja dan laki-laki hanya sekitar 18%. Perempuan mengalami penurunan pendapatan dalam sektor informal seperti pembantu rumah tangga dan juga buruh perempuan yang tidak memiliki keterampilan terkena dampak dari peraturan Covid 19 mengalami penurunan sebesar 46% dari 11,688 ksh pada tahun 2020 menjadi 6,369 di tahun 2021 (Shah et al., 2022).

Penurunan ekonomi perempuan di Kenya akibat pandemi Covid19 menimbulkan permasalahan seperti kekerasan terhadap perempuan di Kenya, kesehatan serta ketidakberdayaan perempuan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Meskipun PBB sendiri sudah mendeklarasikan dan mendukung kesetaraan gender secara penuh melalui program nya yaitu *gender equality* yang menempati urutan prioritas nomor 5 masih banyak pihak yang belum memahami dan mendukung sepenuhnya konsep kesetaraan gender. Perempuan merupakan pihak yang sangat berkontribusi penuh dalam keberlangsungan ekonomi keluarga khususnya di negara negara seperti afrika, berbeda dari perempuan yang hidup di negara maju yang dapat berfokus pada pengembangan diri serta dapat meminimalisir kesenjangan dalam bidang pendidikan yang dijadikan sarana sebagai pengembangan diri perempuan kenya mengalami banyak hambatan untuk menghidupi diri sendiri salah satunya adalah pengembangan skill melalui

pendidikan yang bertujuan agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi (Onyalo, 2019).

Selain daripada itu pertumbuhan ekonomi perempuan di Kenya juga bergantung pada sektor perikanan, yang memegang 70 persen penyedia protein bagi keluarga mereka namun hal ini masih belum mendapat apresiasi dari pemerintah, diperburuk dengan keterbatasan keterampilan dan juga pengetahuan sehingga sektor yang dipegang paling banyak oleh perempuan di kenya ini belum bisa berkembang meskipun memiliki potensi yang besar(Chepkirui et al., 2023)

Di dalam kenyataanya perempuan Kenya merupakan mayoritas pemilik usaha UMKM kecil dan juga mayoritas pekerja pada bidang pertanian yang lebih banyak daripada laki laki yang menyumbang pendapatan terhadap negara namun, Diskriminasi gender berupa sulitnya akses pada teknologi akibat keterbatasan pendidikan serta sulitnya mendapat kredit pada bank akibat dari kurangnya jaminan hal ini sering dialami oleh perempuan dan menghambat peningkatan dan pengembangan usaha UMKM (Makena, Thiaine Kubaison, and Njati 2014)

Pengusaha perempuan yang mengalami dampak yang paling besar akibat pandemi Covid19 dimana sebelum Covid19 mereka mengalami keterbatasan dalam menjual produk dikarenakan peraturan protokol kesehatan dari pemerintah serta urusan rumah tangga yang dimiliki dan juga tanggung jawab moral bahwa perempuan harus lebih mengutamakan suami dan juga anak anaknya serta stigma patriarki namun setelah Covid19 perempuan mengalami dampak regulasi pemerintah dalam bidang transportasi, karena pengusaha perempuan di kenya harus membeli barang di tempat lain namun akibat regulasi Covid 19 perempuan mengalami kendala biaya transportasi yang harus di double daripada sebelum

Covid karena transportasi hanya mengangkut 2 orang sedangkan mereka harus berpergian dan menggunakan lebih dari 1 transportasi akibat keterbatasan dan kekuatan fisik yang kurang memadai pada hari biasa mereka dapat membagi transportasi dengan 5 orang sekaligus namun akibat Covid biaya transportasi mengalami lonjakan yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan (Olubiyi et al., 2022).

Tabel 2 Dampak pandemi Covid 19 terhadap bidang ekonomi

Kategori	**Female**	**Male**
Pengangguran	14%	8%
Agricultural	23%	16%
Kemiskinan	19,4%	13,6%
Politik	33%	67%

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Ketidaksetaraan ekonomi yang terjadi di Kenya tentunya juga menimbulkan permasalahan bukan hanya pada aspek keuangan tingkat ekonomi dan juga akses ekonomi yang dimiliki oleh perempuan di Kenya juga menimbulkan permasalahan yang mengacu pada peningkatan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, ketidakberdayaan ekonomi pada perempuan yang mengakibatkan perempuan mudah mengalami kasus kekerasan, selain itu diskriminasi ekonomi serta pandemi Covid19 yang juga memperparah keadaan sehingga tingkat kekerasan terhadap perempuan Secara umum mengalami peningkatan dan menjadi semakin parah di era Covid19. Kasus kekerasan di

Afrika merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup kesehatan dan juga lambatnya pembangunan baik dari segi pendidikan dan juga tindakan pemerintah. di kenya sendiri menurut survey health demografi kenya sebanyak 39 persen perempuan berusia 15-49 pernah mengalami kekerasan seksual baik itu pelecehan ataupun pemerkosaan, namun tercatat hanya 21 persen yang melapor dikarenakan sulitnya alur pelaporan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan serta stigma sosial apabila perempuan melapor akan mendapatkan cap buruk karena telah mendapatkan pelecehan seksual (Keesbury et al., 2012). Sebelum pandemi Covid19 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan kasus yang cukup tinggi pada tahun 2014 sebanyak 40,7 Persen pernah mengalami kekerasan menurut *Kenya Demographic Health Survey* (John et al., 2021a).

Setelah lockdown dilakukan oleh pemerintah Kenya pada bulan Maret 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis sebanyak 33 Persen meningkat menjadi 43 Persen dan peningkatan aduan kekerasan terhadap perempuan selama *lockdown* menjadi 775 Persen atau sebanyak 3.650 kasus kekerasan telah dilaporkan menurut UN Women (John et al., 2021b).

Kenya national gender and equality commission mengalami kesulitan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan jauh sebelum pandemi terjadi akses perempuan pada kasus kekerasan mengalami hambatan dan kesulitan dalam hal transportasi dan juga sistematis pelaporan yang sangat rumit menghambat penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, polisi yang seharusnya menjadi pelindung di dalam masyarakat apabila menangani kasus kekerasan terhadap perempuan kerap angkat tangan dan juga dengan mudahnya

mengabaikan serta menerima suap sehingga kasus kekerasan dan juga pelecehan terhadap perempuan sulit ditangani kelemahan sumber daya manusia yang juga merupakan penghambat kasus diskriminasi terhadap perempuan (John et al., 2021).

Selain daripada faktor tersebut pemerintah Kenya juga tidak memberikan fasilitas yang mendukung bagi para perempuan yang tinggal di desa karena, sebagian besar permasalahan diselesaikan oleh kepala suku kebanyakan kepala suku di Kenya merupakan laki laki yang tentunya masih sangat menganut sistem patriarki sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang dianggap kurang penting dan juga wajar dan juga merupakan ranah pribadi bagi masing masing rumah tangga sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan sulit untuk dihindari dan diselesaikan sesuai undang undang yang berlaku sehingga prinsip dan tujuan CEDAW yang diadaptasi oleh Kenya menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan, hal tersebut diperparah dengan pandemi Covid 19 dimana akses yang diberikan terhadap perempuan dibatasi oleh lockdown dan juga peraturan pemerintah (John et al., 2021a).

Kebijakan Covid19 membawa dampak terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kenya, Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan meningkat karena perempuan merupakan korban yang paling rentan terhadap kekerasan akibat kebijakan Covid19 menimbulkan kerugian ekonomi yang berdampak pada ketidakstabilan emosi hal tersebut mengakibatkan tingkat kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dan lingkungan sosial semakin meningkat pada bidang kesehatan perempuan juga banyak yang mengalami kekerasan ketiadaan akses dalam memeriksakan kesehatan serta

akses untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan akibat dari larangan Covid19 dimana pusat kesehatan hanya diperuntukkan untuk penderita Covid19 sehingga perempuan yang mengalami kekerasan seperti praktik FGM ataupun kekerasan dalam rumah tangga bahkan kekerasan seksual, pemerkosaan dan pernikahan dini yang berakibat fatal pada kesehatan tidak mendapat fasilitas perawatan dengan mudah. Sementara itu Kenya sendiri merupakan negara dengan peringkat pernikahan dini yang cukup besar di dunia, namun akibat Covid kasus pernikahan dini meningkat 1 dari 4 anak perempuan di bawah umur menikah sebelum usia 18 tahun, dimana hal tersebut juga meningkatkan resiko kekerasan yang dialami oleh perempuan kekerasan tersebut meliputi kehamilan paksa akibat belum siapnya tubuh karena belum berusia 18 tahun hal tersebut juga menuntun terjadinya keguguran dan juga pendarahan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. sementara itu sunat paksa yang masih meningkat dan menjadi permasalahan pada perempuan di kenya juga memberikan peluang tingga pada tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kenya (https://www.the-star.co.ke/authors/johnmuchangi, n.d.)

SRH (Sexual Reproductive Health) yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan pada pasien HIV AIDS yang cukup besar di kenya juga mengalami penutupan dikarenakan regulasi Covid hal ini mengakibatkan banyak perempuan mengalami kendala untuk mengakses kesehatan sexual mereka berupa kontrasepsi dan juga HIV AIDS, akibat dari sulitnya akses kesehatan bagi perempuan karena regulasi Covid 19 banyak perempuan muda yang berakhir hamil sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan setelah Covid mereda ini akan mengakibatkan masalah kemiskinan

dan juga gizi buruk parah karena perempuan tidak dapat melanjutkan hidup dengan baik akibat pendidikan yang buruk dan juga keadaan ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dan mandiri secara ekonomi sehingga akan memicu kasus kekerasan domestik antar pasangan atau keluarga. dari segala regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah perempuan merupakan korban yang mengalami dampak terbesar (Shah et al., 2022).

Ketidaksempurnaan akses kesehatan yang didapatkan oleh perempuan di Kenya juga diakibatkan ketiadaan akses financial khususnya bagi perempuan untuk mengakses kesehatan secara mudah dengan kata lain pihak yang paling dirugikan dari peraturan pemerintah akibat Covid 19 adalah perempuan karena perempuan di Kenya tidak memiliki akses sepenuhnya terhadap kesehatan yang diakibatkan dari beberapa faktor seperti pendidikan dan juga financial seperti diketahui bahwa perempuan di kenya masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga inisiatif pemerintah dalam memberikan awareness melalui handphone akan sangat tidak berguna bagi sebagian besar perempuan di kenya selain itu dengan tingkat pendidikan yang rendah perempuan cenderung mengalami kendala dalam mengakses kesehatan (Munyao & Kithuka, 2021).

Akibat dari Covid 19 yang juga mengancam penyelenggaraan imunisasi bagi anak anak, protokol lockdown yang tidak memberikan pilihan dan juga ruang bagi para perempuan khususnya ibu hamil dan anak anak di Kenya yang mengakibatkan kegiatan imunisasi di kenya menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun Covid 19 lebih banyak menginfeksi laki laki namun pada faktanya beban akibat pandemi Covid 19 lebih banyak ditanggung oleh para perempuan yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan seperti

akses rumah sakit akibat dari kekerasan seksual maupun kekerasan di dalam rumah tangga ketatnya prosedur Covid 19 yang kurang memperhatikan kebutuhan perempuan merupakan salah satu bentuk dari ketidaksetaraan yang terjadi di Kenya (*COVID-19 Gender Assessment_Kenya.Pdf*, n.d.).

2.2 Kegagalan Pemerintah Kenya dalam mengatasi Ketidaksetaraan Gender dan Masuknya UN Women di Kenya

Kontribusi perempuan di bidang ekonomi mendapatkan perhatian dikarenakan terbatasnya kesempatan perempuan untuk ikut serta di dalam bidang ekonomi serta gaji yang didapatkan perempuan yang bekerja di sektor ekonomi sangatlah tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga hal tersebut memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena dengan upah yang sangat minimum perempuan seakan terpaksa terjebak di dalam kemiskinan dan juga bahaya pekerjaan yang tidak sesuai dengan upah yang diterima. Kondisi ketidaksetaraan gender yang terjadi di Kenya terjadi bahkan sebelum pandemi Covid19, Pada seperti bidang ekonomi banyak pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan dikarenakan keterbatasan pendidikan dan diskriminasi pendidikan yang diterima perempuan hingga mengakibatkan perempuan menjadi objek yang rentan terhadap kekerasan.Karena hal tersebut investasi pengembangan ekonomi terhadap perempuan sangatlah diperlukan, agar dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi negara(Shumba et al., 2020).

Oleh karena itu UN Women yan merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam mewujudkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki laki, bekerjasama dengan pemerintah kenya untuk meningkatkan partisipasi ekonomi

antara perempuan dan laki-laki, dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi melalui monitoring dan capacity building yang disediakan oleh UN Women dalam rangka mewujudkan kesetaraan ekonomi. UN Women memonitoring dan bekerjasama dengan pemerintah melakukan annual report dan juga evaluasi. kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender antara laki laki dan perempuan dalam bidang ekonomi khususnya. diskriminasi pada bidang pekerjaan berupa sektor pertambangan dan juga mineral yang masih banyak menyerap tenaga kerja laki laki akibat dari minimnya kualifikasi yang dapat dipenuhi oleh perempuan, hal tersebut juga berdasarkan pada sulitnya akses pendidikan yang dapat dinikmati oleh perempuan yang berpengaruh pada tingkat pendidikan dalam mencari lapangan kerja, pemerintah kenya tidak dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi, selain itu kepemilikan lahan bahkan hal krusial berupa akses pada pinjaman bank harus didasarkan oleh laki laki, hal ini dapat mempengaruhi perempuan yang berusaha dan melakukan kegiatan ekonomi pada bidang pertanian atau usaha kecil menengah (Matagaro, n.d.).

Kenya merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki permasalahan dalam kesetaraan gender antara perempuan dan laki laki hingga kemudian pada 2010 presiden kenya menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan kesetaraan gender yang terjadi di Kenya melalui kerjasama dengan UN Women dan juga membuktikan komitmennya dengan menandatangani konvensi anti kekerasan terhadap perempuan atau biasa disebut CEDAW pada tahun 1984 pada pasal 11, 13 dan 16 pasal- pasal tersebut berbunyi mengenai kesetaraan ekonomi yang berhak dimiliki oleh perempuan contohnya hak tentang gaji, kebebasan bekerja dan kebebasan untuk mendapatkan harta pada

proses perceraian, komitmen Kenya ini juga dituangkan dengan pembuatan hukum secara nasional dan menjadikan prinsip CEDAW sebagai bagian dari tujuan nasional. Komitmen ini merupakan awal mula keterlibatan UN Women dalam mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender di Kenya(“CEDAW-C-KEN-CO-7.Pdf,” n.d.)

Kehadiran UN Women di Kenya tentunya akan membantu pemerintah dan juga perempuan untuk mewujudkan konstitusi yang telah disepakati dan juga dibuat oleh pemerintah Kenya. di dalam konstitusi yang telah dibuat oleh pemerintah terdapat beberapa poin yang digunakan UN Women sebagai acuan dalam mewujudkan kesetaraan gender poin poin tersebut adalah sebagai berikut :

- Partisipasi perempuan dalam bidang politik seperti memimpin dan juga memutuskan permasalahan
- Perempuan dan laki laki berhak mendapat keuntungan dalam bidang ekstraksi industrial serta berhak mendapat manfaat dari pengadaan infrastruktur publik, pertanian dan ekonomi yang dibangun pemerintah
- perempuan dan anak perempuan bebas dari kekerasan berbasis gender

UN Women memiliki beberapa program yang berfokus pada pengembangan perempuan melaui ekonomi dan politik seperti GEWE (Gender Equality and Women Empowerment) yang dijalankan tidak hanya di kenya tetapi kepada seluruh anggota PBB yang menandatangani CEDAW. UN Women berupaya untuk memastikan implementasi kesetaraan gender dengan cara bekerjasama dengan NGO dan juga pemerintah Kenya dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kenya, Kemudian UN Women juga bekerjasama secara responsive dengan palang merah Kenya dan organisasi wanita. di dalam tugasnya

UN Women berupaya memaksimalkan peran perempuan di dalam bidang politik dan ekonomi sehingga perempuan dapat memaksimalkan peran tidak hanya pada bidang rumah tangga atau sebagai pengambil keputusan tunggal di dalam bidang rumah tangga yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kekerasan, Upaya UN Women ini diwujudkan dengan pengesahan undang undang legislatif yang semakin responsif terhadap *gender equality* pada tahun 2016 dimana Kenya mulai memberikan persyaratan terhadap partai politik untuk mewajibkan representasi perempuan pada partai politik. selain itu konstitusi kenya yang baru juga memberikan hak sepenuhnya dalam bidang hukum terhadap perempuan untuk melindungi perempuan dalam hal pernikahan, kekerasan dan kesetaraan ekonomi serta dihapuskannya larangan praktik adat yang diskriminatif seperti Female Genital Mutilation dan hak matrimonial yang dilindungi negara (Byrnes & Freeman, n.d.).

UN Women mulai bekerjasama dengan pemerintah dan juga organisasi lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender dan juga program pengembangan terhadap perempuan agar terwujud lingkungan yang aman dan juga nyaman bagi perempuan. Pada perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Kenya setelah persetujuan untuk memberikan kewenangan UN Women terkait permasalahan kesetaraan gender kerja sama dengan KNBS pada 2020 terkait dampak dari Covid19, Kemudian dilakukan survei dengan menggunakan indikator gender yang digunakan untuk mendukung pelaporan SDG survey juga dilakukan setiap tahun dibantu dengan *Women Empowerment Impact (WEI)*. (Luchsinger & UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2019)

2.3 Aktor yang terlibat dalam membantu UN Women

Dalam mengimplementasikan tujuan dari UN Women tentunya UN Women bekerjasama dengan organisasi milik pemerintah maupun NGO lokal maupun internasional. Permasalahan kesetaraan *gender* yang meliputi berbagai bidang tentunya memerlukan penanganan yang kompleks dan juga complicated, Kenya sendiri merupakan negara yang terbagi menjadi beberapa daerah sehingga UN Women membutuhkan partner dalam melakukan program pemberdayaan dan juga pengawasan terkait isu ketidaksetaraan gender yang terjadi di Kenya.

Kerjasama UN Women dengan *Kenya National Bureau Statistical (KNBS)* yang dilakukan pada tahun 2019 untuk mengetahui situasi dan kondisi perempuan terdampak data serta dilakukan monitoring terkait kasus ketidaksetaraan gender yang terjadi di Kenya, Kerjasama ini berdasarkan dengan komitmen presiden Kenya yang ingin menyelesaikan permasalahan ketidaksetaraan gender, di dalam tugasnya KNBS bertugas memberikan laporan setahun sekali yang digunakan UN Women untuk memonitoring program yang akan dilakukan di Kenya. Keterlibatan organisasi internasional seperti ILO (*International Labour Organization*) yang mengacu pada tingkat kesejahteraan pekerja perempuan dikarenakan perempuan Kenya mengalami kesenjangan gaji dalam hal pekerjaan, UN Women berkoordinasi dengan ILO (“Kenya | UN Women Data Hub” 2023).

Organisasi internasional seperti KOICA juga melakukan kerjasama dengan UN Women pada tanggal 11 Desember 2020 guna mewujudkan program ketahanan ekonomi pada perempuan khususnya petani perempuan di Kenya. Tentunya segala program kerja UN Women membutuhkan sokongan dana UN Women juga melibatkan UNDP dan UN Trust Fund guna memberikan bantuan

terkait program development yang dijalankan di Kenya pada permasalahan ketidaksetaraan gender, selain itu beberapa negara yang juga menjadi penyokong dana seperti pemerintah Jepang dan juga Korea yang ikut serta dalam mewujudkan kesetaraan gender di kenya (Lale, 2020)

Keterlibatan organisasi lokal dari kenya yang bernama GROOTS (Grassroots organizations operations in sisterhood) pada bidang ekonomi dimulai pada 2019 hingga sekarang dan masih terus diperluas , NGO ini merupakan salah satu NGO lokal yang mengupayakan dan menyuarakan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi pada bidang ekonomi khususnya bagi para perempuan pekerja pertanian serta memberikan jaminan survei berbasis bukti yang digunakan untuk mengadvokasi proyek agar program kesetaraan gender dapat dijalankan dengan baik (*Kitui County Gender Mainstreaming Guidelines for Climate Smart Agriculture and Climate Change Adaptations*, n.d.)**.**

BAB 3

IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG EKONOMI OLEH UN WOMEN DALAM BIDANG EKONOMI PADA WANITA DI KENYA TAHUN 2019

Pada bab 3 ini akan menjelaskan analisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh UN Women untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan serta diskriminasi ekonomi yang dihadapi oleh perempuan di kenya pada masa pandemi Covid19, melalui program pengembangan yang dilakukan oleh UN Women serta upaya perlindungan yang diberikan oleh UN Women dalam mengatasi kekerasan yang didapatkan oleh perempuan di masa pandemi Covid19.

Teori organisasi internasional dengan pendekatan manajerial akan dijadikan tolak ukur untuk menjawab bagaimana implementasi UN Women dalam mengatasi kekerasan berbasis gender serta ketidaksetaraan di dalam bidang ekonomi pada wanita di kenya di masa pandemi Covid19. Di dalam implementasi aktor internasional seperti organisasi internasional berperan sebagai penjamin bahwa program kesetaraan gender dapat dijalankan dengan baik melalui sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara. Organisasi internasional akan membantu negara dalam menentukan langkah langkah yang harus diambil negara untuk menyelesaikan sebuah isu atau permasalahan.

Sebagai sebuah organisasi yang berdedikasi untuk mengentaskan permasalahan internasional UN Women bertanggung jawab untuk melakukan proses monitoring dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan negara,

Menurut teori Organisasi Internasional yang diutarakan oleh Juta Joachim dan Verbeek monitoring atau pemantauan merupakan suatu bentuk komitmen organisasi internasional guna menunjang terbentuknya tujuan yang telah disepakati oleh negara dan juga organisasi internasional dalam sebuah perjanjian yang telah disetujui secara bersama. monitoring yang dimaksudkan disini bisa melalui berbagai macam cara seperti laporan dari negara kepada OI terkait serta OI juga menjamin bahwa implementasi dari sebuah permasalahan dapat dilaksanakan dengan baik melalui aktor yang bekerjasama dengan OI dan juga negara sebagai bentuk implementasi tanggung jawab dari organisasi internasional dan juga komite terkait (jutta joachim,Bob Reinalda,Bertjan Verbeek, 2007).

Oleh karena itu pada bab 3 ini akan membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan UN Women sebagai organisasi internasional dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Kenya pada masa pandemi Covid 19 tahun 2019-2024 berdasarkan teori organisasi internasional melalui pendekatan manajerial seperti monitoring (pengawasan), kerjasama dengan aktor lain, bantuan teknis serta bantuan keuangan serta pengembangan kapasitas yang diberikan oleh UN Women kepada negara. Dengan adanya analisis ini akan menjawab rumusan masalah penelitian.

3.1 Manajemen approach UN Women dalam mengimplementasikan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi di Kenya

UN Women merupakan sebuah organisasi internasional yang menurut teori organisasi internasional yang diutarakan oleh juta joachim memiliki beberapa karakter pendekatan dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan internasional, manajemen approach yang dimaksud disini adalah un

women bertindak sebagai lembaga internasional yang melakukan pendekatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi pendekatan yang dilakukan ini juga bersifat soft power yang melibatkan negara dalam proses perundingan dan juga pengambilan keputusan upaya UN Women adalah dengan melakukan monitoring,

3.1.1 Monitoring oleh UN Women berdasarkan laporan kementerian Perempuan Kenya

Kementerian perempuan di Kenya bekerjasama dengan UN Women terkait dengan tujuan penghapusan ketidaksetaraan gender pada bidang ekonomi juga pada bidang sosial dimana, Kerjasama ini pertama kali dilakukan pada tahun 2019 terkait dengan dampak dari pandemi terhadap perempuan di Kenya yang mengalami peningkatan kekerasan akibat dari pandemi Covid19, Kerjasama kementerian perempuan di Kenya dengan UN Women terjalin sejak penandatanganan CEDAW dimana kementerian perempuan dan juga presiden Kenya berkomitmen untuk menghilangkan kekerasan berbasis gender dan juga diskriminasi gender dalam segala bidang. kementerian perempuan memberikan berupa data dan juga kondisi perempuan sehingga UN Women dapat memikirkan bersama dengan pemerintah langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan kasus kekerasan dan juga diskriminasi yang dialami oleh perempuan di Kenya, Selain itu pada permasalahan ketidaksetaraan ekonomi kementerian perempuan di Kenya. (Maina, n.d.)

UN Women berupaya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data melalui program yang bernama Women Count sejak tahun 2016 hingga sekarang yang bertujuan untuk meningkatkan analisis terkait kesetaraan gender. Program

ini juga digunakan untuk membuat survei singkat analisis dampak akibat Covid19 pada bidang ekonomi, Laporan yang diserahkan oleh kementerian perempuan di Kenya digunakan sebagai langkah dasar untuk menentukan program selanjutnya hal ini tentunya juga dibahas melalui forum yang dihadiri oleh UN Women dan perwakilan dari pemerintah Kenya hasil dari diskusi dan juga laporan akan dilaporkan dalam bentuk laporan *county office* (Maina, n.d.)

Program monitoring UN Women meliputi kerjasama dengan pemerintah Kenya program tersebut bernama Women Enterprise Fund dalam bidang usaha kecil menengah dengan memberikan akses kredit perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan akses yang mudah dalam mengembangkan usaha khususnya perempuan ("Kenya Economic Survey 2024" 2024).

UN Women juga melakukan advokasi dukungan terhadap kebijakan politik yang dituangkan dalam political parties amandement bill pada tahun 2021 yang berisi tentang alokasi dana partai politik hanya dapat disahkan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dan juga kepentingan kesetaraan gender (Maina, n.d.)

3.1.2 Monitoring UN Women berdasarkan laporan NGO

Selain melakukan monitoring berdasarkan laporan dari pemerintah organisasi internasional juga melakukan kerjasama dengan NGO lokal yang berada di suatu negara. Tujuan dari monitoring dan kerjasama dengan ngo lokal adalah agar laporan yang didapatkan sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan. UN Women bekerjasama dengan beberapa NGO lokal dalam mencapai tujuan SDG yang juga mengimplementasikan CEDAW di Kenya, NGO lokal yang berada di Kenya tentunya melakukan kegiatan bersama berdasarkan

implementasi CEDAW dan UN Women sehingga tentunya diperlukan kerjasama satu sama lain antara UN Women dengan NGO lokal. CEDAW diimplementasikan oleh UN Women untuk memastikan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki laki dalam bidang ekonomi UN Women bekerjasama dengan SASOL (Sahelian Solution) pada tahun 2018 yang berfokus pada peningkatan kualitas dan *empowering women* dalam bidang pertanian. SASOL yang bergerak dalam meningkatkan perempuan bidang pertanian khususnya pengadaan air yang digunakan untuk mempermudah perempuan melakukan kegiatan bercocok tanam bekerjasama dengan UN Women yang juga berfokus pada kesetaraan gender pada bidang ekonomi keduanya menyelenggarakan program pada Oktober 2022 di Kitui Kenya terkait dengan perubahan iklim dan juga edukasi terhadap keberlangsungan lingkungan melalui pelatihan pertanian yang ramah lingkungan dan menargetkan 15.000 rumah tangga (*Kitui County Gender Mainstreaming Guidelines for Climate Smart Agriculture and Climate Change Adaptations*, n.d.)**.**

3.1.3.Penyelesaian masalah UN Women

Problem solving merupakan sebuah langkah yang diambil oleh sebuah organisasi baik internasional maupun nasional dalam rangka menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara diskusi untuk mencapai sebuah solusi.

Permasalahan yang terjadi di Kenya berupa ketimpangan ekonomi yang cukup jauh bagi perempuan dan laki laki yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan perempuan di Kenya.UN Women berupaya untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi dengan mewujudkan program bernama GEWE (*Gender Equality and Women Empowerment*) yang diusulkan oleh UN Women sebagai

salah satu agenda kerja di Kenya diwujudkan dengan berbagai bidang yang disetujui oleh pemerintah dan juga UN Women("Status of Women's and Girls' Rights in Kenya, 26 Years after Kenya Committed to the Promotion of Gender Equality," 2021)

Dalam mewujudkan GEWE (Gender Equality and Women Empowering) UN Women melakukan asistensi dan juga pendampingan advokasi hukum serta pelatihan pada bidang pemberdayaan ekonomi. Program ini melibatkan kerjasama dengan banyak pihak.

Setelah pembentukan konstitusi Kenya yang baru pada tahun 2010, Presiden Uhuru Kenyatta memiliki komitmen bersama UN Women yang dideklarasikan di Paris pada Juni 2021 untuk mendukung peran UN Women dan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kesehatan reproduksi serta meningkatkan tujuan tercapainya ekonomi yang setara di antara perempuan dan laki- laki secara progresif. Di dalam tujuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kebijakan undang- undang PBB terkait kekerasan berbasis gender serta diskriminasi berbasis gender yang berada secara umum di masyarakat mulai dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pelecehan sexual serta pembunuhan yang terjadi berdasarkan gender, UN Women berperan dalam mendampingi serta mewujudkan tujuan nasional Kenya dalam mewujudkan kesetaraan gender sesuai dengan CEDAW (*Schull_22_RASCTranscript.Pdf*, n.d.).

UN Women di Kenya juga bekerjasama dengan partner seperti UNICEF dan UNDP yang merupakan bagian dari UN Women dalam melakukan monitoring serta menyusun *Annual Report* yang bertujuan untuk memahami kondisi dan keadaan sosial dan politik yang ada di Kenya. Kerja sama ini

ditujukkan untuk membantu meningkatkan informasi terkait masyarakat guna menyelesaikan kesetaraan gender sehingga pemberdayaan ekonomi dapat dirancang menggunakan survei yang ditujukkan untuk kesejahteraan perempuan dan anak ("In Kenya, County Gender Data Sheets Are Ushering in New Laws and Policies" 2019)

UN Women berupaya untuk melaporkan perkembangan data yang telah dianalisis, Terkait dengan kesetaraan gender dan diberikan solusi agar UN Women sebagai lembaga terkait dapat menyelesaikan masalah. Fungsi monitoring UN Women terhadap permasalahan dalam bidang ekonomi serta pencegahan kekerasan berbasis gender yang terjadi di Kenya. Karena Kenya sudah menyetujui peratifikasian CEDAW pada pasal 11,13, dan 16 terkait kesejahteraan ekonomi terhadap perempuan serta hak dan diadakannya diskriminasi terhadap perempuan, Dimana CEDAW dan UN Women merupakan satu kesatuan maka di dalam undang- undang yang disetujui pemerintah Kenya wajib untuk menyerahkan dan memberikan laporan kepada organisasi terkait disini yang dimaksudkan adalah UN Women yang akan digunakan sebagai acuan dan juga pemutusan langkah selanjutnya (*CEDAW-C-KEN-CO-7.Pdf*, n.d.)**.**

Penyerahan laporan yang dilakukan oleh UN Women dengan bekerjasama dengan KNBS (Kenya National Bureau Statistik) yang berada dibawah naungan pemerintah Kenya, kerjasama dan membuat rancangan statistik sektor gender (GSSP) 2019-2020 selain dari rancangan terkait plan kesetaraan gender UN Women juga mengakses data kependudukan yang dituangkan dalam laporan statistik yang dibuat oleh KNBS. Selain itu UN Women juga bekerjasama dengan badan akses pertanian bagi perempuan di Kenya yang digunakan oleh UN Women

untuk mengetahui pembiayaan pertanian yang digunakan UN Women sebagai acuan dalam merevisi kebijakan gender dan juga mengetahui budget yang akan digunakan (“Byrnes and Freeman - THE IMPACT OF THE CEDAW CONVENTION PATHS TO EQUAL.Pdf,” n.d.).

UN Women melakukan kerjasama dengan UNDP pada tahun 2018-2022 pada partisipasi perempuan dalam ekonomi berkelanjutan dalam rangka menghilangkan ketidaksetaraan gender di dalam bidang ekonomi maupun sosial politik, Kerjasama ini mencakup pembuatan strategi dan juga program pemberdayaan perempuan di Kenya bersama UN Women membuat sebuah program yang memberikan pelatihan kepada perempuan terkait kepemimpinan untuk mewujudkan kesetaraan sebagai agenda nasional negara upaya UN Women dalam melibatkan berbagai macam pihak dalam permasalahan kekerasan yang terjadi di kenya agar berbagai pihak mengetahui kondisi dan juga situasi yang terjadi di kenya(“Enhancing Partnerships for Impact | United Nations in Kenya,” n.d.)

UN Women membentuk sebuah forum diskusi yang bernama *generation equality* forum yang didalamnya membahas tentang pembentukan strategi untuk mencapai kesetaraan gender, pembentukan forum ini dilakukan bersama dengan pemerintah Perancis dan juga mexico pada tanggal 29-31 Maret 2021 di Mexico tujuan dari dibentuknya forum ini adalah untuk mempercepat isu kesetaraan gender sesuai dengan Beijing platform yang disepakati oleh negara negara terkait dalam mencapai gender equality(“Status of Women’s and Girls’ Rights in Kenya, 26 Years after Kenya Committed to the Promotion of Gender Equality,” 2021)

Hasil yang didapat dari forum yang diadakan oleh UN Women terdapat 5 tema yang dijadikan fokus untuk mewujudkan kesetaraan gender hingga tahun 2026, lima tema tersebut adalah (1). kesetaraan ekonomi dan hak kerja (2). kekerasan berbasis gender (3). hak terhadap tubuh dan juga hak reproduksi (4). teknologi inovasi dalam mewujudkan kesetaraan gender (5). gerakan feminis, dari lima tema tersebut UN Women dan forum menganggarkan dana untuk mewujudkan kesetaraan gender yaitu sebesar 40 $ miliar hingga tahun 2026 (“Status of Women’s and Girls’ Rights in Kenya, 26 Years after Kenya Committed to the Promotion of Gender Equality,” 2021)

3.1.4 Capacity Building

Menurut teori organisasi internasional juta joachim dan verbek capacity building dalam manajemen approach yang diutarakan di dalam teorinya adalah ketika sebuah organisasi internasional menunjukkan kinerjanya melalui pengembangan kapasitasnya dengan cara membentuk norma dan nilai yang dilakukan secara bersama sama. Dalam konteks ini UN Women di Kenya yang berfokus pada kesetaraan dan juga penghapusan kekerasan serta diskriminasi berfokus untuk menanamkan nilai dan juga norma kepada masyarakat melalui kampanye dan juga advokasi dan *empowering women*.

3.1.2.4 Bidang ekonomi

UN Women memberikan pelatihan bersama bantuan dari UNDP dalam program pengembangan ekonomi perempuan di Kenya melalui AGPO (The Government Access to Government Procurement Opportunity), di dalam agenda tersebut UN Women berupaya untuk memberikan bantuan berupa *financial* dan juga keterampilan di dalam bidang pertanian, dan juga usaha kecil perempuan di

Kenya, selain itu UN Women juga berusaha untuk memberikan bantuan dengan cara bekerjasama dengan Echo Network Afrika pada era Covid 19 usaha kecil terdampak dari para perempuan di kenya yang mengalami kebangkrutan akibat dari Covid 19 sehingga tingkat ekonomi dapat meningkat, kerjasama ini memberikan bantuan sebesar 5 juta KES pinjaman tersebut telah berhasil membantu pengusaha perempuan di kenya sebanyak 1000 usaha kecil yang bergerak dalam bidang kebersihan dan sanitasi seperti masker dan juga sabun untuk mencegah penyebaran covid 19 (*Annual Rep 2021 FINAL_0.Pdf*, n.d.).

Kerjasama UN Women dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi perempuan di Kenya dalam bidang ekonomi melalui bidang pertanian dengan FAO (Food And Agriculture Of United Nations) pada tahun 2020 di Kitui dan Lakipia serta dengan organisasi lokal seperti GROOTS Kenya (Grassroot Organization Operating Together In Sisterhood), yang juga bekerja sama dengan KOICA (The Korean International Cooperation Agency) sebagai penyumbang dana dan juga partner UN Women untuk meningkatkan ekonomi dan juga skill serta menyediakan workshop bagi para perempuan di Kenya dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan serta ekonomi pada bidang pertanian kegiatan tersebut melibatkan 721 perempuan dan 95 laki- laki, agenda dari UN Women adalah untuk meningkatkan ekonomi di dalam bidang pertanian serta memastikan bahwa kegiatan pertanian yang dijalankan oleh perempuan dan laki laki di kenya memiliki kualitas serta pengetahuan yang cukup agar produk yang dihasilkan dapat dijual dengan skala lebih besar dan lebih baik selain menyediakan workshop UN Women juga memastikan setiap orang mendapat akses hasil pertanian secara adil upaya un women ini bertujuan untuk

memberikan perempuan kenya kemudahan dan juga pengembangan skil di dalam bidang pertanian yang tentunya sangat berguna di era Covid19 untuk meningkatkan ekonomi pada perempuan (*Kitui_gender_mainstreaming_guidelines-_final.Pdf*, n.d.).

Kerjasama UN Women dengan *African Continental Trade Area* dalam mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid 19 pada tanggal 15-21 November 2021 di Durban Afrika Utara bagi usaha terdampak seperti UMKM perempuan Afrika, UN Women memberikan dukungan kepada UMKM yang dipimpin oleh perempuan dengan berkolaborasi dengan AFTA untuk membangun keterlibatan perempuan pada kegiatan ekspor dan impor intra Afrika agar perempuan terlibat lebih jauh karena menurut *African Development Bank* sebanyak 70 Persen sektor perdagangan kecil banyak dipegang oleh perempuan, Komitmen UN Women dengan AFTA adalah memberikan peluang dalam bidang impor serta ekspor, Kemudian pelatihan yang berisikan pengetahuan terkait perdagangan serta ekspor dan impor agar barang yang dijual dan diperdagangkan dapat memenuhi kualitas impor dan ekspor AFTA serta memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM (*Empowering Women in Trade*, n.d.).(“Kenya Launches Its National AfCFTA Implementation Strategy | United Nations Economic Commission for Africa,” n.d.)

Dalam menangani permasalahan kesenjangan gaji antara perempuan dan juga laki laki di kenya UN Women juga berupaya untuk melakukan kerjasama dengan ILO dengan melakukan perjanjian pada tanggal 18 Maret 2017 dibawah *Equal Pay Coalition* di New York dengan menjalankan program yang bertujuan untuk memberikan lingkungan kerja dan mengupayakan keseimbangan gaji dan

hak yang sama antara laki- laki maupun perempuan, Di dalam pendampingan UN Women dan ILO berupaya untuk mengadvokasi prinsip prinsip kebijakan dan juga kemitraan untuk mengatasi kesenjangan gaji antara perempuan dan laki laki, Pada saat pandemi covid UN Women dan ILO juga berupaya memberikan hak bagi para volunter perawat yang tidak mendapatkan gaji dengan sesuai selain itu ILO juga memperjuangkan 5R yang berisi tentang ILO berupaya mengurangi pekerja yang tidak dibayar, serta mendistribusikan tugas antara perempuan dan laki laki secara adil, kemudian ILO juga berupaya menyadari adanya pekerja yang tidak mendapat upah dan akan digunakan sebagai data pengambilan keputusan selanjutnya dan yang keempat menghargai segala pekerjaan dan akan mengupayakan pembayaran dan hak hak pekerja secara adil dan yang terakhir adalah mewakili dan mengakui pelayanan di dalam bidang politik dan ekonomi yang tidak mendapatkan gaji dengan layak. Pemerintah Kenya juga berupaya bersama UN Women memperbaiki kondisi pay gap di antara laki laki dan perempuan agar mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman hal tersebut disertai dengan tindakan pemerintah Kenya dalam membentuk kementerian tenaga kerja agar hak hak perempuan dapat terpenuhi serta pemberian upah maksimum yang didasarkan berdasarkan data yang diberikan oleh ILO dan UN Women digunakan untuk mengambil keputusan(“ILOP-Digital-Labour-Kenya-V6_0.Pdf,” n.d.)

Kerjasama UN Women dan UN Fund Trust dengan pemerintah Kenya pada tahun 2019-2022 untuk meningkatkan ekonomi dan memperkuat skill ekonomi u lokal pasca Covid 19 kerjasama ini salah satunya meliputi bidang ekonomi pertanian, di dalam hal ini UN Women dan pemerintah Kenya berupaya

memberikan akses bagi para petani perempuan serta memberikan kemudahan dalam urusan lahan pertanian kepada perempuan, program yang dibuat memang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan secara maksimal dalam urusan bercocok tanam sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan mudah di pasar ekspor maupun impor. paya ini tentunya didukung dengan pengadaan sanitasi air yang baik bagi lahan pertanian serta peralatan yang diberikan kepada para petani agar hasil pertanian lebih banyak dan efektif bantuan berupa pembangunan pam air dan juga traktor selain itu pembentukan badan koperasi pertanian yang dapat diakses ketika petani membutuhkan modal(Mulu et al., 2022).

UN Women berupaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang ekonomi melalui kerjasama dengan pemerintah jepang dalam memberikan pelatihan pada bidang usaha kecil seperti menjahit dengan kreatif agar ekonomi perempuan di era pandemi tidak tenggelam pemberian training di era covid 19, Serta kerjasama UN Women dengan Kenya Women Trust Fund dalam bidang financial yang digunakan sebagai pinjaman bagi para perempuan pengusaha kecil dengan bunga yang sedikit di tengah pandemi covid 19 dan hal tersebut telah membantu sebanyak 669 di 45 bagian negara di kenya (*Keeping Kenya's Women-Led Businesses Afloat during COVID-19 Lockdown*, 2021)

Usaha UN Women dalam membangkitkan sektor ekonomi perikanan bagi perempuan dengan mengusulkan permudahan pinjaman dan juga akses keuangan bagi perempuan di Kenya serta memberikan pengetahuan terkait usaha perikanan yang berkelanjutan, UN Women mengadakan kerjasama dengan CORDIO (*Coastal Ocean Research Indian Ocean*) yang berupaya meningkatkan pariwisata

bawah laut kenya dan ekonomi perempuan di kenya dengan *sustainable*(*Strengthening Local Leadership and Governance – CORDIOEA*, n.d.)

3.2 Bantuan UN Women di Kenya

Menurut teori organisasi internasional bantuan keuangan dan asistensi diberikan untuk mendukung pelaksanaan program yang sejalan dengan tujuan organisasi internasional. UN Women sebagai salah satu organisasi internasional yang berada di Kenya menyediakan dukungan berupa pemberdayaan dan juga bantuan keuangan yang diberikan kepada masyarakat ataupun komunitas terkait dan digunakan untuk mendukung keberlanjutan program serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial.

3.2.1 Bantuan keuangan dan teknis oleh UN Women kepada Kenya

Menurut juta joachim dan verbeek pendekatan manajerial di dalam teori organisasi internasional mengatakan bahwa bantuan keuangan dan teknis yang diberikan oleh organisasi internasional kepada negara akan dapat meningkatkan kapasitas sebuah OI dalam mewujudkan perjanjian yang telah disetujui agar dapat terwujud dengan baik, bantuan yang diberikan OI kepada negara tentunya bukan hanya berupa uang namun juga bantuan dengan mitra terkait yang dapat mendukung terwujudnya perjanjian di negara tersebut.

UN Women memiliki berbagai program pengembangan yang digunakan untuk mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia, bantuan yang diberikan oleh UN Women berupa pemberdayaan dan juga pengembangan keahlian khususnya para perempuan agar dapat hidup secara mandiri dan terbebas dari segala bentuk penindasan. Bantuan ini dikhususkan kepada para perempuan di kenya yang juga dibantu oleh beberapa mitra UN Women yang ada di seluruh

dunia dalam menjalankan program pengembangan. kerjasama yang dilakukan UN Women dengan pemerintah akan diberikan kepada para perempuan yang membutuhkan, bantuan tersebut digunakan untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap perempuan agar dapat keluar dari ketidaksetaraan gender yang terjadi di Kenya.

Program yang dimiliki oleh UN Women dalam memberikan bantuan kepada perempuan yang ada di seluruh dunia agar dapat meningkatkan kegiatan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Menurut PBB FGE (Fund For Gender Equality) merupakan sebuah hibah yang ditujukan untuk memberikan bantuan di bidang ekonomi dan politik pada kasus kesetaraan gender, FGE dan UN Women bekerjasama dalam menangani permasalahan ekonomi pada perempuan di Kenya, seperti permasalahan hak lahan, pemberian dan pelatihan berupa workshop dan juga alat alat teknologi untuk mendukung pertanian di Kenya, selain itu FGE juga memberikan bantuan berupa kemudahan akses usaha kecil menengah kesulitan akibat Covid 19 berupa keterbatasan akses pasar serta model hukum dalam peluncuran produk umkm khas Kenya FGE memberikan bantuan sebesar $ 305.000 pada bidang pertanian yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi, bantuan tersebut diberikan kepada Association Nationale des Femmes agricultrices du Bénin - National Association of Women Farmers in Benin dan juga kepada Association d'Entraide et de Développement - Aid and Development Association sebesar $334.121 pada bidang umkm perempuan di kenya (*FGE-Grantee Summaries-2016-2018-En.Pdf*, n.d.).(Lale, 2020)

Kerjasama UN Women dengan berbagai pihak tidak terbatas hanya pada satu negara saja Jepang juga ikut memberikan bantuan sebesar $ 909.091 dalam rangka memberikan bantuan terkait Covid 19 dimana pekerja perempuan yang terpaksa dirumahkan akibat dari Covid19 serta mendukung perempuan secara finansial bersama UN Women berupaya untuk memberikan perlindungan kepada para perempuan di kenya dari kekerasan berbasis gender bantuan tersebut dimulai dari bulan juni 2020 hingga mei 2021 (*The Government of Japan to Fund UN Women Programs to Address the Impact of COVID-19 on Women and Girls in Africa*, 2020).

3.2.2 Bantuan Teknis Berupa Pemberdayaan oleh UN Women Kepada Perempuan di Kenya

Bantuan yang diberikan UN Women tidak hanya berupa uang yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesetaraan, UN Women juga melakukan *empowering* melalui bantuan berupa *soft skill* yang dapat digunakan oleh para perempuan sebagai salah satu cara mewujudkan kehidupan yang layak. Potensi perempuan di Kenya yang belum banyak digali mengakibatkan UN Women merasa bertanggung jawab untuk membersamai dengan melakukan kegiatan yang bersifat membangun dan empowering khususnya bagi para perempuan.

Capacity building yang dilakukan oleh UN Women mengupayakan perempuan yang bekerja dibidang pertanian mendapatkan kemudahan dalam mengelola lahan pertanian melalui kerjasama yang dijalin bersama FAO di Nyanza, Rift Valley dan Eastern Kenya serta kerjasama dengan KOICA sejak tahun 2016 hingga 2020 dan dilakukan secara rutin program yang dilakukan adalah pemberdayaan mengenai pertanian dan juga pengetahuan mengenai iklim

agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya lingkungan saat akan melakukan kegiatan bertani ini juga meliputi pengetahuan tentang benih dan juga metode bercocok tanam sesuai dengan perubahan iklim yang terjadi di Kenya secara benar dan juga baik, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menuntaskan kelaparan dan juga kemiskinan khususnya pada perempuan yang bekerja pada bidang pertanian (*FAO Signs a USD 5m KOICA Funded Project with UN Women | FAO in Kenya | Food and Agriculture Organization of the United Nations*, n.d.).

Upaya UN Women untuk meningkatkan peran perempuan melalui pengembangan bisnis kecil setelah Covid19 yang mengalami penutupan, UN Women berupaya memberikan pemahaman terkait dengan program pemerintah Kenya yang memberikan pinjaman khususnya terhadap perempuan pengusaha bisnis kecil, selain itu Workshop UMKM. Pada tahun 2020 di Kawangware Kenya yang dijalankan oleh UN Women bersama *Uweza foundation* dan pemerintah Jepang selama 2 bulan dalam pembuatan masker dan juga hand sanitizer yang dapat dijual dan dijadikan mata pencaharian selama pandemi Covid 19 (*Small Business, Big Impact on Families in Kenya's Informal Settlements*, 2021).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Permasalahan ketidaksetaraan gender merupakan isu yang terjadi di seluruh dunia, permasalahan ini merupakan hal yang bisa terjadi terhadap perempuan maupun laki laki secara global. namun menurut statistik yang ada perempuan menjadi korban yang lebih rentan terdampak kesetaraan. Kenya sendiri merupakan negara dengan kasus kesetaraan gender yang cukup besar antara laki laki dan perempuan, perempuan di kenya mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang yang paling krusial adalah bidang ekonomi. akibat dari diskriminasi dan ketimpangan perlakukan yang dihadapi perempuan di Kenya pada bidang ekonomi yang mempengaruhi peran perempuan dalam berbagai bidang salah satunya adalah tingginya angka kekerasan yang dihadapi perempuan di Kenya karena ketidakberdayaan ekonomi akibat diskriminasi serta pandemi Covid 19 yang terjadi di Kenya.

UN Women berupaya untuk bekerjasama serta memperbaiki sistem yang ada di kenya agar akses yang dimiliki perempuan Kenya pada bidang ekonomi dapat diterima secara merata dan juga baik. Upaya UN Women untuk memberdayakan perempuan pada bidang ekonomi agar kehidupan sosial perempuan di Kenya mencapai keamanan dan kenyamanan. Menurut teori Implementasi Organisasi Internasional yang ditulis oleh Joachim dan Verbek UN Women menggunakan sebuah metode pendekatan bernama managerial approach dimana UN Women menyebarkan visi dan misi nya untuk mengatasi

ketidaksetaraan gender pada bidang ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial perempuan di Kenya.

Melalui pendekatan ini UN Women bekerjasama dengan berbagai pihak baik itu pemerintah Kenya NGO atau Organisasi Internasional lainya, yang memiliki tujuan yang sama dengan UN Women. UN Women melakukan monitoring data yang didapatkan dari berbagai organisasi internasional nasional untuk melengkapi data yang diberikan oleh pemerintah Kenya dalam menyelesaikan permasalahan ketidaksetaraan gender. Kerjasama yang dilakukan dengan UNDP ILO DAN FAO serta pemerintah Kenya untuk menyelesaikan ketidaksetaraan ekonomi yang dirasakan oleh perempuan di Kenya. dengan menggunakan pendekatan ini un women memberikan fasilitas pemberdayaan perempuan serta mendampingi perempuan di Kenya untuk mendapatkan hak sesuai dengan komitmen kenya terhadap CEDAW . Bantuan yang diberikan berupa teknis dan juga keuangan yang dipublikasikan secara terbuka.

Adanya implementasi UN Women untuk menyelesaikan ketidaksetaraan ekonomi yang dirasakan oleh perempuan di kenya tentunya membawa dampak positif karena fasilitas dan juga pendampingan yang diberikan UN Women untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksetaraan pada bidang ekonomi akibat pandemi Covid 19 yang cukup membantu perempuan di kenya dalam mengatasi krisis akibat pandemi.

4.2 Rekomendasi

Penulis menyadari masih ada beberapa hal yang tidak terbahas secara keseluruhan mengenai objek penelitian yang belum dibahas secara sempurna permasalahan yang diangkat penulis belum sepenuhnya mencakup keseluruhan

permasalahan ketidaksetaraan gender di Kenya. oleh karena itu penulis berharap pada penelitian selanjutnya akan ada pembahasan mengenai ketidaksetaraan *gender* pada bidang yang lainnya agar dapat dijadikan pengetahuan dan wawasan mengenai ketidaksetaraan gender yang terjadi di Kenya, Pada penelitian ini juga terdapat peran KOICA dan FAO dalam menyelesaikan permasalahan ketidaksetaraan gender pada bidang ekonomi di Kenya. peneliti juga melihat terdapat permasalahan lain yang berkaitan dengan UN Women seperti permasalahan kelompok teroris AL- Shabab yang masih berhubungan dengan peran UN Women karena belum ada penelitian yang membahas hal tersebut maka akan menarik untuk dibahas pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://womankindkenya.org/

About UN Women. (n.d.). UN Women – Headquarters. Retrieved October 3, 2023, from https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women

Annual Rep 2021 FINAL_0.pdf. (n.d.). Retrieved August 21, 2023, from https://africa.unwomen.org/sites/default/files/2022-07/Annual%20Rep%202021%20FINAL_0.pdf

Byrnes, A., & Freeman, M. A. (n.d.). *THE IMPACT OF THE CEDAW CONVENTION: PATHS TO EQUALITY A STUDY FOR THE WORLD BANK*.

CEDAW-C-KEN-CO-7.pdf. (n.d.). Retrieved October 4, 2023, from https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-KEN-CO-7.pdf

Chepkirui, M., Orina, P. S., Orina, T., Githukia, C., Ochingo, J., Achoki, J. K., Chepkirui, M., Orina, P. S., Orina, T., Githukia, C., Ochingo, J., & Achoki, J. K. (2023). Review on the role of women along the aquaculture value chain in Kenya. *Annals of Marine Science*, *7*(1), 021–024. https://doi.org/10.17352/ams.000034

COVID-19 Gender Assessment_Kenya.pdf. (n.d.). Retrieved October 7, 2023, from https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/COVID-19%20Gender%20Assessment_Kenya.pdf

FAO signs a USD 5m KOICA funded project with UN Women | FAO in

Kenya | Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from https://www.fao.org/kenya/news/detail-events/en/c/1364292/

FGE-GranteeSummaries-2016-2018-en.pdf. (n.d.). Retrieved October 18, 2023, from https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Trust%20Funds/FundGenderEquality/FGE-GranteeSummaries-2016-2018-en.pdf

Gender and Economic Growth in Kenya: Unleashing the Power of Women. (2007). World Bank Publications.

Hackfort, S., Kubitza, C., Opiyo, A., Musotsi, A., & Huyskens-Keil, S. (2024). African indigenous vegetables, gender, and the political economy of commercialization in Kenya. *Agriculture and Human Values*, *41*(2), 541–559. https://doi.org/10.1007/s10460-023-10498-4

https://www.the-star.co.ke/authors/johnmuchangi. (n.d.). *UN warns of growing Covid-19 child brides in Kenya*. The Star. Retrieved November 28, 2023, from https://www.the-star.co.ke/news/2021-03-08-un-warns-of-growing-covid-19-child-brides-in-kenya/

In Focus: 16 Days of Activism against Gender-based Violence. (n.d.). UN Women – Africa. Retrieved October 5, 2023, from https://africa.unwomen.org/en/get-involved/end-violence-against-women_africa

John, N., Roy, C., Mwangi, M., Raval, N., & McGovern, T. (2021a). COVID-19

and gender-based violence (GBV): Hard-to-reach women and girls, services, and programmes in Kenya. *Gender & Development*, *29*(1), 55–71. https://doi.org/10.1080/13552074.2021.1885219

John, N., Roy, C., Mwangi, M., Raval, N., & McGovern, T. (2021b). COVID-19 and gender-based violence (GBV): Hard-to-reach women and girls, services, and programmes in Kenya. *Gender & Development*, *29*(1), 55–71. https://doi.org/10.1080/13552074.2021.1885219

jutta joachim,Bob Reinalda,Bertjan Verbeek. (2007). *International Organization and Implementation enforces managers authorities?*

Keesbury, J., Onyango-Ouma, W., Undie, C.-C., Maternowska, C., Mugisha, F., & Askew, I. (2012). *A review and evaluation of multi-sectoral response services ('one-stop centers') for gender-based violence in Kenya and Zambia*. Population Council. https://doi.org/10.31899/rh1.1008

Kenya counter terror agency and UN Women commit to integrate gender equality into national policy. (2023, April 5). UN Women – Africa. https://africa.unwomen.org/en/stories/news/2023/04/kenya-counter-terror-agency-and-un-women-commit-to-integrate-gender-equality-into-national-policy

Kenya Economic Update: COVID-19 Erodes Progress in Poverty Reduction in Kenya, Increases Number of Poor Citizens. (n.d.). World Bank. Retrieved August 22, 2023, from https://www.worldbank.org/en/country/kenya/publication/kenya-economic-update-covid-19-erodes-progress-in-poverty-reduction-in-kenya-increases-number-of-poor-citizens

Kitui County gender mainstreaming guidelines for climate smart agriculture and climate change adaptations. (n.d.). UN Women – Africa. Retrieved October 5, 2023, from https://africa.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/08/kitui-county-gender-mainstreaming-guidelines-for-climate-smart-agriculture-and-climate-change-adaptations

LABOUR RPT ON SESSIONAL PAPER NO 2 OF 2019—NATIONAL GENDER & DEVT POLICY.pdf. (n.d.). Retrieved November 28, 2023, from http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2020-10/LABOUR%20RPT%20ON%20SESSIONAL%20PAPER%20NO%202%20OF%202019%20-%20NATIONAL%20GENDER%20%26%20DEVT%20POLICY.pdf

Lale, A. (2020). THE SOFT POWER OF SOUTH KOREA. *Asya Studies*, *4*(13), 63–74. https://doi.org/10.31455/asya.615427

Luchsinger, G., & UN Women, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (Eds.). (2019). *A short history of the Commission on the Status of Women*. UN Women.

Matagaro, L. (n.d.). *UNIVERSITY OF NAIROBI INSTITUTE OF DIPLOMACY AND INTERNATIONAL STUDIES*.

Munyao, M., & Kithuka, E. (2021). *The Role of Religion in Public Life*.

Olubiyi, T. O., Jubril, B., Sojinu, O. S., & Ngari, R. (2022). Strengthening Gender Equality in Small Business and Achieving Sustainable Development Goals (SDGS): Comparative Analysis of Kenya and Nigeria. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, *10*(2), Article 2. https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5663

Onyalo, P. O. (2019). *WOMEN AND AGRICULTURE IN RURAL KENYA: ROLE IN AGRICULTURAL PRODUCTION*. *4*.

PERAN UN WOMEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PADA BIDANG PERTANIAN DI UGANDA TAHUN 2015 – 2021. (n.d.). Retrieved May 17, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/372895265_PERAN_UN_WOMEN_DALAM_UPAYA_PEMBERDAYAAN_EKONOMI_PEREMPUAN_PADA_BIDANG_PERTANIAN_DI_UGANDA_TAHUN_2015_-_2021

Promoting Gender Equity and Inclusivity in the Employment Sector in Kenya – KIPPRA. (n.d.). Retrieved November 11, 2024, from https://kippra.or.ke/promoting-gender-equity-and-inclusivity-in-the-employment-sector-in-kenya/

Ramadhan, I., & Maâ€™sumah, I. (2018). MENGKAJI PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER MELALUI PERSPEKTIF FEMINISME. *Jurnal Asia Pacific Studies*, *2*(2), Article 2. https://doi.org/10.33541/japs.v2i2.871

Schull_22_RASCTranscript.pdf. (n.d.). Retrieved October 2, 2023, from https://libres.uncg.edu/ir/wcu/f/Schull_22_RASCTranscript.pdf

Shah, P., Maina, L., & Kimutai, D. (2022). *African women's digital flight: The bright future of the gig economy*.

Shamimi, Z., & Rijal, N. K. (2022). Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG's). *INTERDISCIPLINARY*

JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, *3*, 1. https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.31062

Shumba, C., Maina, R., Mbuthia, G., Kimani, R., Mbugua, S., Shah, S., Abubakar, A., Luchters, S., Shaibu, S., & Ndirangu, E. (2020). Reorienting Nurturing Care for Early Childhood Development during the COVID-19 Pandemic in Kenya: A Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(19), 7028. https://doi.org/10.3390/ijerph17197028

Simister, J. G. (2010). Domestic Violence and Female Genital Mutilation in Kenya: Effects of Ethnicity and Education. *Journal of Family Violence*, *25*(3), 247–257. https://doi.org/10.1007/s10896-009-9288-6

Small business, big impact on families in Kenya's informal settlements. (2021, May 12). UN Women – Africa. https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/05/feature-story---small-business-big-impact-on-families-in-kenya

Status of women's and girls' rights in Kenya, 26 years after Kenya committed to the promotion of gender equality. (2021, July 30). *Equality Now*. https://www.equalitynow.org/press_release/gef_kenya_sgbv_july_2021/

Strengthening Local Leadership and Governance – CORDIOEA. (n.d.). Retrieved November 11, 2024, from https://cordioea.net/strengthening-bmu_governance/

The Government of Japan to Fund UN Women Programs to Address the Impact of COVID-19 on Women and girls in Africa. (2020, June 12). UN Women – Africa. https://africa.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/06/japan-fun

d-covid19

UN Women in Action. (n.d.). UN Women – Africa. Retrieved October 5, 2023, from https://africa.unwomen.org/en/what-we-do/gender-data-and-statistics/un-women-in-action

Welcome to WomanKind Kenya. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from http://womankindkenya.org/